



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

LEGAL STANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM JUDICIAL REVIEW  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2019)

FATKUR MAI RAHMAN, Dwi Haryati, S.H., M.H.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Basiang, Martin, 2016, *The Contemporary Law Dictionary: Second Edition*, Gramedia, Jakarta.

Brannen, Daniel E. dan Richard Clay Hanes, 2001, *Supreme Court Drama: Cases that Changed America Volume 4*, UXL, Woodbridge.

Cane, Peter, 2011, *Administrative Law*, Oxford University Press, Oxford.

Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi: serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Fatmawati, 2010, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara*, UI-Press, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.

Kelsen, Hans, 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge.

Kelsen, Hans, 2008, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, Ltd., Clark.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Manan, Bagir, 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin, 2017, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok.

Ranuhandoko, IPM, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rousseau, Jean-Jacques, 2002, *The Social Contract and the First and Second Discourses*, Yale University Press, New Haven.

Soebichi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soebichi, Imam, 2016, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.



**LEGAL STANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM JUDICIAL REVIEW  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2019)**

FATKUR MAI RAHMAN, Dwi Haryati, S.H., M.H.

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Strong, C.F., 1963, *A History of Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, G.P. Putnam's Sons, New York.

Suny, Ismail, 1977, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.

Wheare, K.C., 2005, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta.

## **MAKALAH**

Asshiddiqie, Jimly, "Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi", The Three "E" Lecture Series, @america, Pacific Place, Jakarta, 18 Juni 2012.

Kurniawati, Dyah Estu, *Ide, Pembelajaran, dan Perubahan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Kerangka Perubahan Kebijakan di Era Governance*, prosiding, The UUM International Conference on Governance 2014, *Global Governance: Contemporary Issues and Prospects*, Universiti Utara Malaysia, 29-30 November 2014.

## **JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA**

Achmad, Rafli Fadilah, "Tinjauan Yuridis atas Legal Standing Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015.

Afkar, Kardiansyah, "Redistribusi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD NRI 1945", *tesis*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Amsari, Feri, "Menghambat Laju Judicial Terrorism pada Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 1, 2010.

Anindyajati, Titis, "Politik Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 19 Nomor 1, 2017.

A. Rondinelli, Dennis, John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema, "Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience", *World Bank Staff Working Papers Number 581 Management and Development Series Number 8*, The World Bank, Washington, D.C, 1983.

Butarbutar, Franky, "Qualification of Environmental Loss as a Corruption (Legal Analysis on the Court Decision No. 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst. and No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)", *tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Butt, Simon, "Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court", *Asian Journal of Law and Society*, Volume 6, 2019.



**LEGAL STANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM JUDICIAL REVIEW  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2019)**

FATKUR MAI RAHMAN, Dwi Haryati, S.H., M.H.

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Butt, Simon dan Nicholas Parsons, "Judicial Review and the Supreme Court in Indonesia: A New Space for Law?", *Indonesia*, Volume 97, April 2014.

Conyers, Diana, "Decentralization and Development: A Review of the Literature", *Public Administration and Development*, Volume 4, 1984.

Faiz, Pan Mohamad, "Judicialization of Politics", *The Jakarta Post*, 8 November 2011.

Faiz, Pan Mohamad, "Legal Problems of Dualism of Judicial Review System in Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 16 Nomor 2, Mei 2016.

Ginsburg, Tom, "The Constitutional Court and The Judicialization of Korean Politics", *New Courts in Asia*, Routledge, 2010.

Hawin, Muhammad, *bahan kuliah*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Hidayat, Syarif, "Mengurai Peristiwa – Merentas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah", *Prisma*, Volume 29 Nomor 3, Juli 2010, LP3ES, Jakarta.

Huda, Ni'matul, "Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2008.

Kariem, Fadjrianti, "Legal Standing Organisasi yang Tidak Berbadan Hukum sebagai Termohon dalam Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi", *artikel ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Kurniadi, Danang, "Pemisahan Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Lestari, Sulistyani Eka, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 19, Februari 2015.

Mahfud MD, Moh., "Kekacauan Teoretis dalam Ketentuan Judicial Review", *UNISIA*, Nomor 29 Tahun XVI, 1996.

Mezak, Meray Hendrik, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V Nomor 3, Maret 2006.

Nurbaningsih, Enny, "Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah (Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya)", *ringkasan disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Prananingrum, Dyah Hapsari, "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2014.

Rahman, Irfan Nur *et al*, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 5, Oktober 2011.

Ramdan, Ajie, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 4, Desember 2014.



**LEGAL STANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM JUDICIAL REVIEW  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2019)**

FATKUR MAI RAHMAN, Dwi Haryati, S.H., M.H.

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Ristyawati, Aprista, "Analisis Hukum mengenai Legal Standing Pemohon dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Indonesia sebagai Wujud Negara Demokratis", *tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.

Safa'at, Muchamad Ali, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)", *disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Safa'at, Muchamad Ali, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*.

Setiono, Joko, "Hubungan Pusat dan Daerah", *bahan kuliah*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Supriyadi, "Penelitian Hukum Normatif dalam Penulisan Tesis", *bahan kuliah*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Syahuri, Taufiqurrohman, "Politik Hukum Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 2, Juni 2012.

Windrawan, Puguh, "Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2013.

Qomar, Nurul, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1, November 2012.

## INTERNET

Alexander Hamilton, "Federalist No. 78", <https://www.congress.gov/resources/display/content/The+Federalist+Papers#TheFederalistPapers-78>, 9 Maret 2020.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Perbaikan Pelaksanaan Kemudahan Berusaha Ease of Doing Business di Indonesia", [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/whyinvest\\_file/Greenlab\\_BKPM\\_Web\\_2017\\_MaterialDownload-EoDB\\_Ind\\_20171110.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/whyinvest_file/Greenlab_BKPM_Web_2017_MaterialDownload-EoDB_Ind_20171110.pdf), 16 April 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Program Legislasi Nasional", <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas/year/2017>, 18 Maret 2019.

Fathimah Fildzah Izzati, "Korupsi: Akibat Persekongkolan Kapitalisme dengan Demokrasi", <https://indoprogress.com/2013/04/korupsi-akibat-persekongkolan-kapitalisme-dengan-demokrasi/>, 2 Mei 2019.

Hasanudin, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek", <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>, 1 Juli 2020.

Hukumonline.com, "18 UU Terbit Sepanjang 2017, Ini Daftarnya", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/l5a4b364bb8f96/18-uu-terbit-sepanjang-2017--ini-daftarnya>, 18 Maret 2019.



**LEGAL STANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM JUDICIAL REVIEW  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2019)**

FATKUR MAI RAHMAN, Dwi Haryati, S.H., M.H.

UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Hukumonline.com, “Metamorfosis Badan Hukum Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia/>, 15 Maret 2020.

Hukumonline.com, “Obesitas Regulasi Hambat Masuknya Investasi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/l5ee09af5432f6/obesitas-regulasi-hambat-masuknya-investasi/>, 29 Juni 2020.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Presiden Umumkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah”, <https://www.kemendagri.go.id/blog/4334-Presiden-Umunkan-Pembatalan-3143-Perda-Bermasalah>, 18 Maret 2019.

Kompas.com, “Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/22392261/putusan.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda.provinsi>, 19 Maret 2019.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan: Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011”, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/764-kewenangan-udi-materiil-peraturan-perundang-undangan-di-bawah-undang-undang.html>, 27 April 2020

Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4”, <https://www.pusako.or.id/index.php/148-konferensi-nasional-hukum-tata-negara-ke-4>, 18 Maret 2018.

Saldi Isra dan Feri Amsari, “Perubahan Konstitusi melalui Tafsir MK”, <https://feriamsari.wordpress.com/2009/01/29/perubahan-konstitusi-melalui-tafsir-mk/#more-190>, 13 Maret 2019.

Shidarta, “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, 1 Mei 2020.

Sudikno Mertokusumo, *Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15774/gugatan-actio-popularis-dan-batas-kewenangan-hakim>, 11 Maret 2019

WorldAtlas.com, “What Is A Unitary State?”, <https://www.worldatlas.com/articles/what-is-a-unitary-state.html>, 11 April 2019

Zainal Arifin Mochtar, “Perihal Menata Regulasi”, <https://kumparan.com/zainal-muchtar/perihal-menata-regulasi>, 15 Maret 2019.

Zainal Arifin Mochtar, “Perihal Menata Regulasi (2)”, <https://kumparan.com/zainal-muchtar/perihal-menata-regulasi-2>, 13 Maret 2019.